



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ayat (1) menyebutkan "Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Program Pembentukan Perda", ayat (2) "Program Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda" dan ayat (3) "Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD";
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 24 Oktober 2023;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 24 Oktober 2023;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai dasar pengajuan pembahasan peraturan daerah dan merupakan skala prioritas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta memuat daftar Komulatif Terbuka.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Tembusan :

1. Wali Kota Surakarta;
2. Wakil Wali Kota Surakarta;
3. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
4. Inspektur Kota Surakarta;
5. Arsip

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SURAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

1. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

| NO. | JENIS | TENTANG                                                                  | MATERI POKOK | STATUS |      | PELAKSANAAN | DISERTAI |                                  | UNIT/<br>INSTANSI TERKAIT | TARGET<br>PENYAMPAIAN | KET |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|-------------|----------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----|
|     |       |                                                                          |              | BARU   | UBAH |             | NA       | PENJELASAN<br>ATAU<br>KETERANGAN |                           |                       |     |
| 1.  | PERDA | TATA CARA<br>PENYUSUNAN<br>PROGRAM<br>PEMBENTUKAN<br>PERATURAN<br>DAERAH |              | √      |      |             | √        |                                  |                           | TAHUN 2024            |     |

## 2. DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

| NO. | JENIS | TENTANG                                                       | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                 | STATUS |      | PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                    | DISERTAI |                                  | UNIT/<br>INSTANSI TERKAIT                                                                                                                                           | TARGET<br>PENYAMPAIAN | KET |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
|     |       |                                                               |                                                                                                                                                                                              | BARU   | UBAH |                                                                                                                                                                                                                                                                | NA       | PENJELASAN<br>ATAU<br>KETERANGAN |                                                                                                                                                                     |                       |     |
| 1.  | PERDA | RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 - 2043 | 1. KETENTUAN UMUM<br>2. MAKSUD DAN TUJUAN<br>3. KEWENANGAN PEMERINTAH<br>4. INDUSTRI UNGGULAN<br>5. RPIK 2023 - 2043<br>6. PELAKSANAAN<br>7. PEMBIAYAAN<br>8. PENGAWASAN DAN PELAPORAN HIDUP | ✓      |      | 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN<br>SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA | ✓        |                                  | 1. BAGIAN HUKUM<br>2. BAPPEDA<br>3. BADAN PUSAT STATISTIK<br>4. BPKAD<br>5. DINAS KETENAGAKERJAAN<br>6. DINAS LINGKUNGAN HIDUP<br>7. DINAS PERDAGANGAN<br>8. DISUPR | TAHUN 2024            |     |

[illegible]

## 3. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| NO. | JENIS | TENTANG                                                                                     | MATERI POKOK                                                                                                                                                            | STATUS |      | PELAKSANAAN                                                                                   | DIBERTAI |                                  | UNIT/<br>INSTANSI TERKAIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TARGET<br>PENYAMPAIAN | KET |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
|     |       |                                                                                             |                                                                                                                                                                         | BARU   | UBAH |                                                                                               | NA       | PENJELASAN<br>ATAU<br>KETERANGAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |     |
| 1.  | PERDA | PENYELENGGA<br>RAAN<br>KETENTRAMAN,<br>KETERTIBAN<br>UMUM DAN<br>PERLINDUNGAN<br>MASYARAKAT | MUATAN POKOK<br>MENGENAI<br>PENANGANAN<br>GANGGUAN<br>KETENTRAMAN DAN<br>KETERTIBAN UMUM<br>DAN PENEGAKAN<br>PERATURAN<br>DAERAH DAN/ATAU<br>PERATURAN KEPALA<br>DAERAH | ✓      |      | PERATURAN<br>PEMERINTAH<br>NOMOR 16<br>TAHUN 2018<br>TENTANG<br>SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA | ✓        |                                  | 1. BAGIAN HUKUM<br>2. DINAS<br>PERHUBUNGAN<br>3. DINAS<br>PERDAGANGAN<br>4. DINAS<br>KEBUDAYAAN<br>DAN PARIWISATA<br>5. DINAS<br>PENDIDIKAN<br>6. DINAS<br>PERUMAHAN KPP<br>7. DINAS<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP<br>8. DPUPR<br>9. DINAS SOSIAL<br>10. DPMPSTSP<br>11. BADAN<br>KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK<br>12. BAPENDA<br>13. KECAMATAN<br>14. KELURAHAN<br>15. TNG<br>16. POLRI | TAHUN 2024            |     |

## 4. DINAS PERDAGANGAN

| NO. | JENIS | TENTANG                                         | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | STATUS |      | PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                                  | DISERTAI |                                  | UNIT/<br>INSTANSI TERKAIT                                                                              | TARGET<br>PENYAMPAIAN | KET |
|-----|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
|     |       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BARU   | UBAH |                                                                                                                                                                                                                                                                              | NA       | PENJELASAN<br>ATAU<br>KETERANGAN |                                                                                                        |                       |     |
| 1.  | PERDA | PENGELOLAAN DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>PASAR RAKYAT | 1. ASAS, TUJUAN<br>FUNGSI DAN<br>RUANG<br>LINGKUP<br>2. KEDUDUKAN<br>PASAR<br>3. TUGAS<br>WEWENANG<br>DAN TANGGUNG<br>JAWAB<br>4. PENGELOLAAN<br>PASAR<br>(PERENCANAAN<br>KLASIFIKASI<br>PASAR,<br>PELAKSANAAN)<br>5. PENGGUNAAN<br>FASILITAS<br>PASAR<br>6. SISTEM DAN<br>PROSEDUR<br>PEMBERIAN<br>IZIN | √      |      | 1. UNDANG-<br>UNDANG<br>NOMOR 7<br>TAHUN 2014<br>TENTANG<br>PERDAGANGAN<br>SEBAGAIMANA<br>TELAH<br>BEBERAPA KALI<br>DIUBAH<br>TERAKHIR<br>DENGAN<br>UNDANG -<br>UNDANG<br>NOMOR 6<br>TAHUN 2023<br>TENTANG<br>PENETAPAN<br>PERATURAN<br>PEMERINTAH<br>PENGOANGTI<br>UNDANG - | √        |                                  | 1. BAGIAN HUKUM<br>2. BPKAD<br>3. DINAS<br>PERHUBUNGAN<br>4. SATPOL PP<br>5. DINAS LINGKUNGAN<br>HIDUP | TAHUN 2024            |     |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>7. TATA TERTIB DALAM PASAR</p> <p>8. HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI</p> <p>9. PEMERDAYAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN</p> <p>10. KERJASAMA, PERAN MASYARAKAT</p> <p>11. PENDAPATAN PASAR</p> <p>12. DIGITALISASI PASAR</p> <p>13. KETENTUAN PENYIDIKAN</p> <p>14. KETENTUAN PIDANA</p> <p>15. KETENTUAN PERALIHAN</p> |  | <p>UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG – UNDANG</p> <p>2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

## 5. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

| NO. | JENIS | TENTANG     | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | STATUS |      | PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                                            | DISERTAI |                                  | UNIT/<br>INSTANSI TERKAIT                                                                                                                  | TARGET<br>PENYAMPAIAN | KET |
|-----|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
|     |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BARU   | UBAH |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NA       | PENJELASAN<br>ATAU<br>KETERANGAN |                                                                                                                                            |                       |     |
| 1   | PERDA | RUMAH SUSUN | 1. KETENTUAN UMUM<br>2. KEBLIAKAN PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN<br>3. JENIS PEMANFAATAN RUMAH SUSUN<br>4. PEMBINAAN<br>5. PERENCANAAN<br>6. PENYEDIAAN RUMAH SUSUN UMUM<br>7. IZIN RENCANA FUNGSI DAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN SERTA PENGUBAHANNYA<br>8. STANDAR BANGUNAN RUMAH SUSUN<br>9. PEMBIAHAN RUMAH SUSUN<br>10. SPM RUMAH SUSUN | √      |      | 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIRUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANGGARAN UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG - UNDANG | √        |                                  | 1. BAGIAN HUKUM<br>2. DPUPR<br>3. DPMPTSP<br>4. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA<br>5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP<br>6. DINAS PEMADAM KEBAKARAN |                       |     |

[illegible]

[illegible]

## 6. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

| NO. | JENIS | TENTANG           | MATERI POKOK | STATUS |      | PELAKSANAAN | DISERTAI |                                  | UNIT/<br>INSTANSI TERKAIT | TARGET<br>PENYAMPAIAN | KET |
|-----|-------|-------------------|--------------|--------|------|-------------|----------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----|
|     |       |                   |              | BARU   | UBAH |             | NA       | PENJELASAN<br>ATAU<br>KETERANGAN |                           |                       |     |
| 1.  | PERDA | INOVASI<br>DAERAH |              | √      |      |             | √        |                                  |                           | TAHUN 2024            |     |

## 7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

| NO. | JENIS | TENTANG                                           | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                                                                     | STATUS |      | PELAKSANAAN                                                                        | DISERTAI |                                  | UNIT/<br>INSTANSI TERKAIT                                              | TARGET<br>PENYAMPAIAN | KET |
|-----|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
|     |       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BARU   | UBAH |                                                                                    | NA       | PENJELASAN<br>ATAU<br>KETERANGAN |                                                                        |                       |     |
| 1.  | PERDA | PENYELENGGAR<br>AAN<br>PENANGGULANG<br>AN BENCANA | 1. PENINGKATAN<br>PELAYANAN DAN<br>PERLINDUNGAN<br>KEPAIDA<br>MASYARAKAT<br>DALAM KESLIJAKAN<br>PEMBANGUNAN DI<br>BIDANG<br>PENANGGULA<br>NGAN BENCANA<br>2. PENYELENGGARA<br>AN PENANGGULA<br>NGAN BENCANA<br>BERBASIS<br>MASYARAKAT<br>DENGAN<br>PELIBATAN UNSUR<br>PENTAHELIK |        | √    | UNDANG -<br>UNDANG NOMOR<br>24 TAHUN 2007<br>TENTANG<br>PENANGGULA<br>NGAN BENCANA |          | √                                | 1. BAG. HUKUM<br>2. DINAS SOSIAL<br>3. DINAS KESEHATAN<br>4. SATPOL PP | TAHUN 2024            |     |

|  |  |  |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 3. PERAN PERANGKAT<br>DAERAH DALAM<br>KOLABORASI<br>PENANGANAN<br>BENCANA<br>(PRABENCANA,<br>TANGGAP<br>DARURAT DAN<br>PASCA BENCANA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. PENGAKOMODASI<br>AN INISATIF<br>KONTEN LOKAL<br>DAN<br>PERKEMBANGAN<br>TERBARU METODE<br>PENANGANAN<br>BENCANA                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. PENGATURAN<br>SANKSI PIDANA                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

|    |       |                                                                                                            |                                                                                                                                                |   |  |                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                          |            |  |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1. | PERDA | PENYERTAAN<br>MODAL KEPADA<br>PERUSAHAAN<br>UMUM DAERAH<br>PERGUDANGAN<br>DAN ANEKA<br>USAHA<br>PEDARINGAN | PENYERTAAN<br>MODAL<br>PEMERINTAH<br>KOTA<br>SURAKARTA<br>PADA<br>PERUSAHAAN<br>UMUM DAERAH<br>PERGUDANGAN<br>DAN ANEKA<br>USAHA<br>PEDARINGAN | ✓ |  | 1. PERATURAN<br>PEMERINTAH<br>NOMOR 54<br>TAHUN 2018<br>TENTANG<br>BADAN USAHA<br>MILIK DAERAH<br><br>2. PERATURAN<br>DAERAH KOTA<br>SURAKARTA<br>NOMOR 12<br>TAHUN 2019<br>TENTANG<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DAERAH | ✓ | 1. BPKAD<br>2. INSPEKTORAT<br>3. BAGIAN HUKUM<br>4. PERUMDA BANK<br>SOLO | TAHUN 2024 |  |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|------------|--|

## 9. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

| NO. | JENIS | TENTANG                                                                                                                                                      | MATERI POKOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | STATUS |      | PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DISERTAI |                                  | UNIT/INSTANSI<br>TERHAIT                                             | TARGET<br>PENYAMPAIAN | KET |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
|     |       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BARU   | UBAH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NA       | PENJELASAN<br>ATAU<br>KETERANGAN |                                                                      |                       |     |
| 1.  | PERDA | PERUBAHAN<br>ATAS<br>PERATURAN<br>DAERAH KOTA<br>SURAKARTA<br>NOMOR 10<br>TAHUN 2015<br>TENTANG<br>PERLINDUNGAN<br>DAN<br>PENGELOLAAN<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP | PENYELARASAN<br>SUBSTANSI MATERI<br>MENGACU PADA<br>UNDANG - UNDANG<br>NOMOR 6 TAHUN<br>2023 TENTANG<br>PENETAPAN<br>PERATURAN<br>PEMERINTAH<br>PENGGANTI UNDANG<br>- UNDANG NOMOR 2<br>TAHUN 2022<br>TENTANG CHTA<br>KERJA MENJADI<br>UNDANG - UNDANG<br>SERTA PERATURAN<br>PERUNDANG -<br>UNDANGAN DI<br>BAWAHNYA DI<br>BIDANG<br>LINGKUNGAN HIDUP |        | √    | 1. UNDANG-<br>UNDANG<br>NOMOR 32<br>TAHUN 2009<br>TENTANG<br>PERLINDUNG<br>AN DAN<br>PENGELOLA<br>AN<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP<br>SEBAGAIMA<br>NA TELAH<br>DIUBAH<br>DENGAN<br>UNDANG -<br>UNDANG<br>NOMOR 6<br>TAHUN 2023<br>TENTANG<br>PENETAPAN<br>PERATURAN<br>PEMERINTAH<br>PENGGANTI<br>UNDANG -<br>UNDANG<br>NOMOR 2<br>TAHUN 2022 | √        |                                  | 1. BAGIAN HUKUM<br>2. DPMPTSP<br>3. DPUPR<br>4. DINAS<br>PERHUBUNGAN | TAHUN 2024            |     |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | TENTANG<br>CIPTA KERJA<br>MENJADI<br>UNDANG -<br>UNDANG<br>2. PERATURAN<br>PEMERINTAH<br>NOMOR 22<br>TAHUN 2021<br>TENTANG<br>PENYELENG<br>GARAAN<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

## 10. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

| NO. | JENIS | TENTANG                                                                                        | MATERI POKOK                                                                                                                                                                | STATUS |      | PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DISERTAI |                                  | UNIT/<br>INSTANSI TERKAIT   | TARGET<br>PENYAMPAIAN | KET |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----|
|     |       |                                                                                                |                                                                                                                                                                             | BARU   | UBAH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NA       | PENJELARAN<br>ATAU<br>KETERANGAN |                             |                       |     |
| 1.  | PERDA | RENCANA<br>PEMBANGUNAN<br>JANGKA<br>PANJANG<br>DAERAH KOTA<br>SURAKARTA<br>TAHUN 2025-<br>2045 | 1. GAMBARAN UMUM<br>KONDISI DAERAH<br>2. PERMASALAHAN<br>ISU - ISU<br>STRATEGIS<br>DAERAH<br>3. VISI DAN MISI<br>DAERAH<br>4. ARAH KEBLIAKAN<br>DAN SASARAN<br>POKOK DAERAH | √      |      | 1. UNDANG -<br>UNDANG<br>NOMOR 25<br>TAHUN 2004<br>TENTANG<br>SISTEM<br>PERENCANA<br>AN PEMBANGU<br>NAN NASIONAL<br>2. UNDANG -<br>UNDANG<br>NOMOR 23<br>TAHUN 2014<br>TENTANG<br>PEMERINTA<br>HAN DAERAH<br>SEBAGAIMANA<br>TELAH<br>BEBERAPA<br>KALI DIUBAH<br>TERAKHIR<br>DENGAN<br>UNDANG -<br>UNDANG<br>NOMOR 6<br>TAHUN 2023<br>TENTANG<br>PENETAPAN | √        |                                  | SELURUH<br>PERANGKAT DAERAH | TAHUN 2024            |     |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | PERATURAN<br>PEMERINTAH<br>PENGANTAI<br>UNDANG -<br>UNDANG<br>NOMOR 2<br>TAHUN 2022<br>TENTANG<br>CIPTA KERJA<br>MENJADI<br>UNDANG -<br>UNDANG |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

## 11. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

| NO. | JENIS | TENTANG                    | MATERI POKOK | STATUS |      | PELAKSANAAN | DISERTAI |                                  | UNIT/<br>INSTANSI TERKAIT | TARGET<br>PENYAMPAIAN | KET |
|-----|-------|----------------------------|--------------|--------|------|-------------|----------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----|
|     |       |                            |              | BARU   | UBAH |             | HA       | PENJELASAN<br>ATAU<br>KETERANGAN |                           |                       |     |
| 1.  | PERDA | TOLERANSI<br>BERMASYARAKAT |              | ✓      |      |             | ✓        |                                  |                           | TAHUN 2024            |     |

## 12. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

| NO. | JENIS | TENTANG                  | MATERI POKOK | STATUS |      | PELAKSANAAN | DISERTAI |                                  | UNIT/<br>INSTANSI TERKAIT | TARGET<br>PENYAMPAIAN | KET |
|-----|-------|--------------------------|--------------|--------|------|-------------|----------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----|
|     |       |                          |              | BARU   | UBAH |             | HA       | PENJELASAN<br>ATAU<br>KETERANGAN |                           |                       |     |
| 1.  | PERDA | PELINDUNGAN<br>PEREMPUAN |              | ✓      |      |             | ✓        |                                  |                           | TAHUN 2024            |     |

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SURAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

| NO. | JENIS | TENTANG                                                                                                     | MATERI POKOK                                                                                                                        | STATUS |      | PELAKSANAAN                                                                                       | DISERTAI |                                  | UNIT/<br>INSTANSI TERKAIT            | TARGET<br>PENYAMPAIAN | KET |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----|
|     |       |                                                                                                             |                                                                                                                                     | BARU   | UBAH |                                                                                                   | NA       | PENJELASAN<br>ATAU<br>KETERANGAN |                                      |                       |     |
| 1.  | PERDA | PERTANGGUNGJAWABAN<br>PELAKSANAAN<br>ANGGARAN<br>PENDAPATAN DAN<br>BELANJA DAERAH<br>TAHUN ANGGARAN<br>2022 | LAPORAN<br>KEUANGAN<br>PEMERINTAH KOTA<br>SURAKARTA UNTUK<br>ANGGARAN<br>PENDAPATAN DAN<br>BELANJA DAERAH<br>TAHUN ANGGARAN<br>2022 | √      |      | PERATURAN<br>PEMERINTAH<br>NOMOR 12<br>TAHUN 2019<br>TENTANG<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DAERAH |          | √                                | TIM ANGGARAN<br>PEMERINTAH<br>DAERAH | TAHUN 2023            |     |

|    |       |                                                                      |                                                                                                                                         |   |  |                                                                              |  |   |                                |            |  |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------------------------------------------------------------------------|--|---|--------------------------------|------------|--|
| 2. | PERDA | PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 | PERGESERAN ANGGARAN ANTAR ORGANISASI, ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR PROGRAM, ANTAR KEGIATAN, DAN ANTAR JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023 | ✓ |  | PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |  | ✓ | TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2023 |  |
| 3. | PERDA | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024           | RENCANA KEUANGAN TAHUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024                                                                                     | ✓ |  | PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |  | ✓ | TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2023 |  |

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURABAYA,



BUDI PRASETYO